



PEMERINTAH  
KABUPATEN SIDOARJO

POLICY  
BRIEF

# INDEKS RASA AMAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021

2021

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



# Policy Brief

Desember, 2021

## INDEKS RASA AMAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020

### Ringkasan Eksekutif

Salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintahan suatu wilayah adalah rasa aman. Menjadi sangat mustahil jika memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dengan mengesampingkan masalah keamanan. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan di bidang politik dan keamanan memerlukan sebuah instrumen yang dapat mengukur serta memberikan gambaran kondisi politik dan keamanan terkini. Hal ini sekaligus untuk memperkuat tradisi *evidence based policy making* yang saat ini sedang diusung pemerintah. Keberadaan sebuah instrumen yang *reliable* dengan demikian menjadi sangat penting dalam pemberian rekomendasi bagi perumusan intervensi kebijakan yang akan diambil pemerintah

Kajian ini melakukan pengukuran indeks toleransi berdasarkan indikator Indeks Keamanan Masyarakat Indonesia atau IKMI (Bappenas) sebagai instrumennya, dengan menggunakan metode survey yang didukung oleh data sekunder di OPD terkait. Hasil dari kajian ini menggambarkan bahwa Indeks Rasa Aman Kabupaten Sidoarjo mencapai angka 76,60 dan termasuk dalam kategori Tinggi. Peningkatan yang sangat signifikan ini menjadi merupakan jawaban atas upaya pemerintah dalam menanggulangi dampak covid-19.



# Policy Brief

Desember, 2021

## Pendahuluan

Pentingnya rasa aman bagi manusia dikemukakan oleh Abraham Maslow dalam sebuah teori yang dikenal dengan hierarki kebutuhan. Dalam hal ini tingkat kebutuhan manusia dibagi ke dalam lima tingkatan atau yang lebih familiar dengan sebutan piramida Maslow yaitu (i) kebutuhan fisiologis atau *physiological needs*, (ii) kebutuhan akan rasa aman atau *safety needs*, (iii) kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang atau *social needs*, (iv) kebutuhan akan penghargaan atau *esteem needs*, dan (v) kebutuhan akan aktualisasi diri atau *self actualization*.

Polri sebenarnya telah menyusun indikator kamtibmas, seperti jumlah tindak pidana (*crime total*), angka tindak pidana (*crime rate*), dan selang waktu terjadinya tindak pidana (*crime clock*). Hanya saja indikator-indikator tersebut belum mencakup peristiwa-peristiwa tindak pidana yang tidak dilaporkan/ tidak tertangkap. Mengingat budaya masyarakat Indonesia yang masih rendah dalam hal lapor-melapor, angka-angka ini diyakini masih jauh dari angka sesungguhnya. Sehubungan dengan itu, maka diperlukan alat ukur yang dapat mencerminkan situasi keamanan yang dirasakan masyarakat. Dinamika internasional telah mendorong bagi perluasan pemaknaan keamanan bukan hanya terfokus kepada keamanan negara namun mencakup keamanan manusia. Keamanan manusia mencakup beberapa gagasan besar dengan aspek yang sangat luas dan dimaknai secara berbeda baik secara konseptual maupun perhitungan. Hal ini kemudian menghasilkan inisiatif bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo untuk membentuk sebuah indeks mengenai keamanan manusia.



# Policy Brief

Desember, 2021

## Metodologi

Kajian Indeks Rasa Aman ini digunakan metode penelitian survey dengan jenis penelitian deskriptif. Sampel di ambil berdasarkan probability sampling dengan teknik simple random sampling. Data primer diperoleh melalui wawancara pada responden terpilih di lokasi kajian, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi dari OPD terkait.

Populasi dalam kajian adalah masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang berjumlah 2.249.476 jiwa dan tersebar dalam 18 kecamatan (Kabupaten Sidoarjo dalam Angka 2020, BPS). Sedangkan penentuan jumlah sampel (responden) di tentukan dengan rumus SLovin, dengan derajat kesalahan 5% maka jumlah sampel yang akan di ambil adalah 400 orang. Jumlah tersebut akan di sebar merata ke 18 kecamatan (masing-masing kurang lebih 22 - 23 kuesioner).

Setelah data terkumpul, kemudian diolah dan analisa. Data kuesioner menggunakan skala likert, untuk kemudian di beri skor dalam proses penghitungan indeks rasa aman, dengan ketentuan sebagai berikut

Nilai Indeks Rasa Aman (IRA)	Keterangan
$0 \leq IRA \leq 20$	Rasa Aman Sangat Rendah
$20 < IRA \leq 40$	Rasa Aman Rendah
$40 < IRA \leq 60$	Rasa Aman Sedang
$60 < IRA \leq 80$	Rasa Aman Tinggi
$80 < IRA \leq 100$	Rasa Aman Sangat Tinggi

## Hasil Kajian

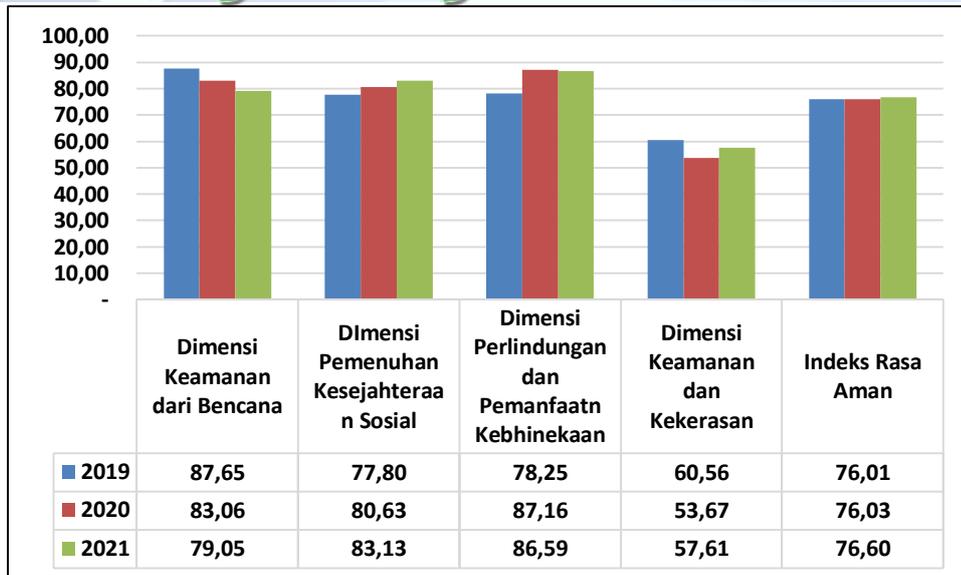
### I. Pengukuran Indeks Rasa Aman

Pencapaian indeks rasa aman mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dari 76,01 di tahun 2019 menjadi 76,03 di tahun 2020 lalu, mencapai angka 76,60 di tahun 2021. Perbandingan capaian masing-masing dimensi untuk tahun 2020, 2019, dan 2021 bisa di lihat pada gambar berikut ini:



# Policy Brief

Desember, 2021



Sumber: Data Lapangan, diolah

Gambar 1.  
Perbandingan Capaian Indeks Rasa Aman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2021

Dari penghitungan tersebut, di peroleh nilai indeks rasa aman sebesar 76,60. Hal ini berarti angka rasa aman di Kabupaten Sidoarjo tergolong kategori tinggi. Temuan tentang rasa aman yang ditunjukkan dari hasil survei ini menunjukkan capaian angka tertinggi ada pada dimensi Perlindungan dan Pemanfaatan Kebhinekaan. Tentu saja temuan ini semakin menegaskan tingkat toleransi di Kabupaten Sidoarjo yang sangat tinggi. Perlu di garis bawahi aspek kebhinekaan/keragaman adalah karakter dasar masyarakat Indonesia yang menjadi dasar eksistensi negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28 E ayat 1-3 dan Pasal 28 I (ayat 1 - 2) juga telah ditegaskan bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak atas kebebasan untuk menganut suatu agama, menyatakan pemikirannya, menentukan sikap politik serta berhak untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun. Maka dengan capaian indeks dimensi ini yang 86,59 dan termasuk kategori tinggi cukup signifikan dengan ketentuan yang sudah di atur dalam Undang-Undang. Keberagaman suku, keberagaman karakter dari para urban yang



# Policy Brief

Desember, 2021

ada di Sidoarjo pada tahun 2021, justru menimbulkan kondisi yang kondusif dan sangat minim konflik.

Tertinggi kedua adalah dimensi Pemenuhan Kesejahteraan Sosial yakni 83,13. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun yang sebelumnya. Hal ini berarti masyarakat Kabupaten Sidoarjo merasa bahwa pemerintah kabupaten telah melakukan berbagai upaya rekatif ataupun antisipatif berkenaan dengan bencana.

Selanjutnya, untuk dimensi pemenuhan kesejahteraan sosial, capaian nya adalah 83,13 termasuk kategori tinggi. Dengan tambahan pemaparan data mengenai indeks ketahanan pangan, jenis dinding rumah untuk tempat tinggal layak dan prosentase tingkat pengangguran terbuka, masyarakat Kabupaten Sidoarjo sudah merasa terpenuhi kebutuhan fisik dan biologis serat kebutuhan sosial nya untuk berkehidupan layak. Pencapaian indeks paling rendah di miliki oleh Dimensi Keamanan dan kekerasan, yakni 57,61. Namun hal yang perlu diperhatikan untuk dimensi keamanan dan kekerasan fisik adalah, pernyataan-pernyataan dalam kuesioner yang di ajukan kepada responden adalah berkalimat negatif. Jadi jawaban yang di harapkan untuk menggambarkan kondisi yang aman dari kekerasan adalah memang yang mengandung jawaban tidak setuju atau sangat tidak setuju. Jadi jika capaian nya rendah justru menggambarkan kondisi yang aman, sedangkan kalau capaian tinggi maka justru masyarakat merasa sangat was – was akan ancaman keamanan dan kekerasan fisik dalam kehidupan sehari-hari.



# Policy Brief

Desember, 2021

## II. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Capaian

### Indeks Rasa Aman

#### 1. Kesejahteraan Sosial

- a. Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum Untuk Memasak

Tabel 1  
Prosentase Rumah Tangga Menurut Kebutuhan Air Minum

Jenis Sumber Air	% Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan
Air Kemasan	41,75%
Leding	27,15%
Sumur Bor/Pompa	5,23%
Sumur/ Mata Air Terlindung	1,51%
Sumur/Mata Air Tidak Terlindung	21,47%

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Sidoarjo 2020

Dari tabel diatas, terlihat bahwa akses terhadap sumber air minum di wilayah ini telah mengalami pergeseran, dari cara konvensional (air sumur/ pompa) dan beralih ke jenis sumber air minum yang lain, yaitu air kemasan dan leding/mata air terlindung. Menilik hasil jawaban dari responden mengenai rasa aman terhadap air bersih, rupayany data yang tercantum di tabel sudah cukup signifikan. Dimana total 97% responden menyatakan sudah tercukupi untuk air bersihnya.

- b. Mengenai pernyataan tentang kecukupan pangan, sebagian besar responden sudah merasa cukup dan mudah untuk akses pangan. Namun demikian, masih ada beberapa golongan masyarakat yang merasa sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu di ketahui Indeks Ketahanan Pangan kabupaten Sidoarjo.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang disusun oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian merupakan penyesuaian dari indeks yang telah ada berdasarkan ketersediaan data tingkat kabupaten. Pada tahun 2019, Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo mencapai angka 82,05 dan menempati peringkat ke 66 dari 416 kabupaten se Indonesia.



# Policy Brief

Desember, 2021

Sedangkan pada tahun 2020, capaian ini meningkat menjadi 83,42. (Sumber: Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian)

- c. Selain masalah pangan dan akses air bersih, masalah kesehatan juga menjadi hal yang penting untuk di perhatikan, Indikator yang digunakan dalam hal ini adalah Angka Harapan Hidup.

Angka harapan hidup pada saat lahir. Perkiraan lama hidup rata-rata bayi baru lahir dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas sepanjang hidupnya. Tahun 2019, Angka Harapan Hidup Kabupaten Sidoarjo adalah 73,98. Hal ini berarti, bayi yang lahir pada tahun 2018 berkesempatan hidup sampai usia 73 tahun. Sedangkan pada tahun 2020, Angka Harapan Hidup meningkat menjadi 74,04.

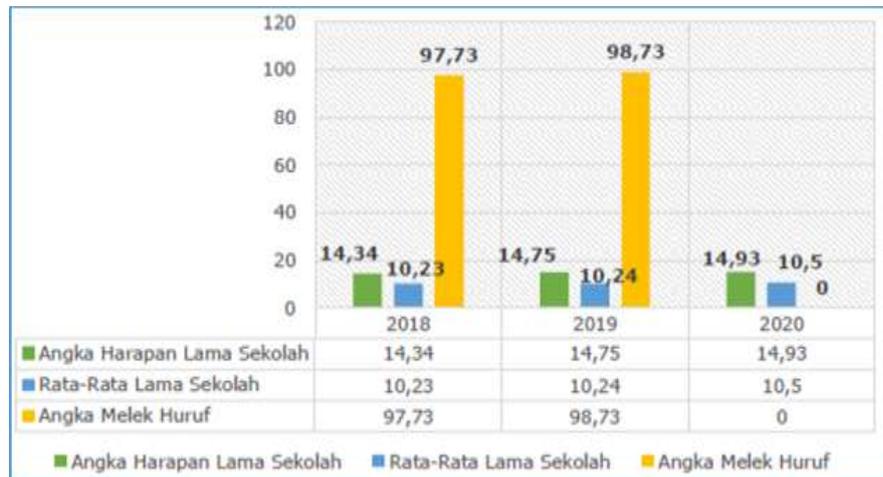
- d. Indikator lain yang digunakan untuk melengkapi jawaban responden tentang pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial adalah masalah struktur rumah, dimana rasa aman akan tempat tinggal yang layak juga menjadi suatu kebutuhan yang harus di penuhi. Pada Tahun 2020 telah dilakukan realisasi peningkatan rumah layak huni di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 104 Unit dengan APBD 30 unit rumah dan dana APBN program BSPS sebanyak 74 unit rumah. Keberhasilan peningkatan rumah layak huni ini telah banyak dilakukan oleh kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat

Selanjutnya untuk Indikator Pemenuhan Aman Kebutuhan Sosial dan Aktualisasi Diri, ada sektor pendidikan dan ketenagakerjaan. Berikut grafik Capaian Pembangunan Bidang Pendidikan.



# Policy Brief

Desember, 2021



Sumber: Biro Pusat Statistik, diolah

Gambar 2.  
Angka Harapan Lama Sekolah, Rata – Rata Lama Sekolah dan  
Angka Melek Huruf Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Setelah mengetahui pencapaian pemenuhan kebutuhan sosial di bidang pendidikan maka selanjutnya akan di sampaikan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan social berkaitan dengan lapangan pekerjaan.

Jumlah penduduk usia kerja (usia 15 Tahun) di Sidoarjo pada Agustus 2020 sebanyak 1,78 juta orang, naik 30,02 ribu orang dibandingkan Agustus 2019. Penduduk usia kerja cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Dari total penduduk usia kerja pada Agustus 2020 tersebut, 1,19 juta orang diantaranya merupakan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 di Sidoarjo mengalami kenaikan 2,00 persen atau sekitar 23,50 ribu dibandingkan Agustus 2019. Komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada Agustus 2020, Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Sidoarjo juga meningkat. TPAK pada Agustus 2020 tercatat sebesar 67,17 persen, meningkat 0,19 persen poin dibanding setahun yang lalu. Kenaikan TPAK memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi

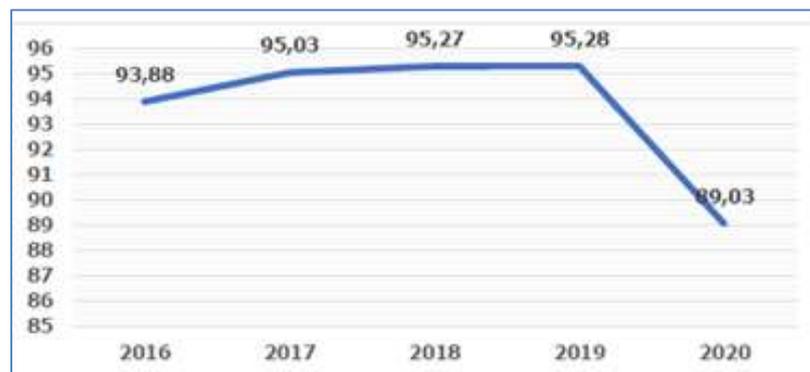


# Policy Brief

Desember, 2021

dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja. Kenaikan TPAK ini utamanya disebabkan oleh kenaikan jumlah penganggur dan jumlah absolut penduduk bekerja yang terserap di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Penduduk Sidoarjo yang terserap pada 9 (Sembilan) sektor tenaga kerja secara persentasenya mencapai angka di atas 90 persen dan cenderung mengalami kenaikan. Satu-satunya penurunan hanya terjadi pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Berikut adalah grafik kenaikan tenaga kerja Sidoarjo yang terserap dalam 9 sektor:



Sumber: RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 – 2020

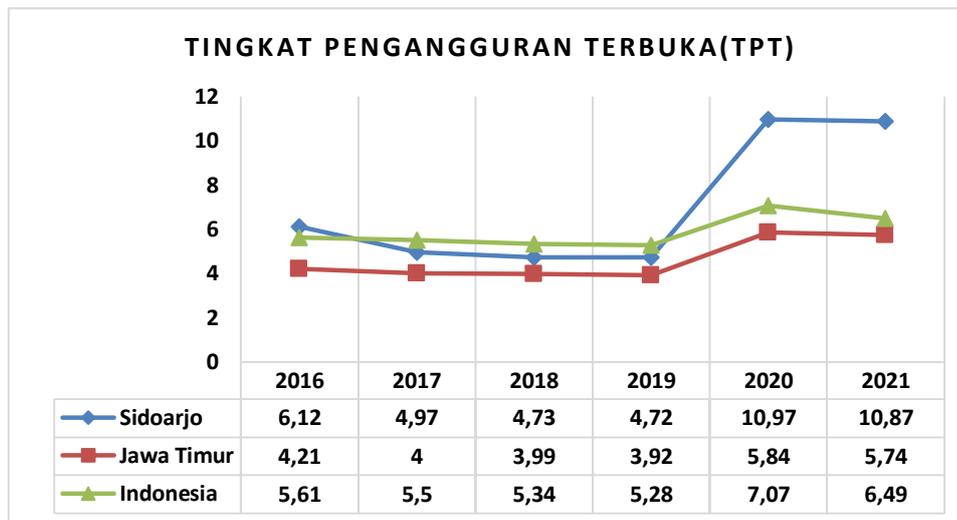
Gambar 3.  
Presentase Tenaga Kerja Terserap di 9 Sektor Tahun 2016-2020

Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan 0,49 dari tahun kemarin. Pada tahun 2021, TPT Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar, 10,87. Trend TPT bisa di lihat pada gambar berikut:



# Policy Brief

Desember, 2021



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2021

Gambar 4.  
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dan Nasional  
Tahun 2016 – 2020

## 2. Ekonomi

Pandemi Covid-19 telah membawa dampak signifikan terhadap sektor ekonomi. Bukan hanya kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat miskin, tetapi kondisi perekonomian secara nasional juga global turut terdampak.

Khusus untuk mengatasi masalah ekonomi yang dialami masyarakat miskin dan yang terdampak Covid-19, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menggulirkan sejumlah bantuan sosial (bansos) baik bansos yang bersifat reguler maupun nonreguler.

Kemudian, untuk memperkuat ekonomi arus bawah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga menyiapkan program Kartu Usaha Perempuan Mandiri atau KURMA, yaitu bantuan modal Rp550 juta untuk kaum perempuan, terutama yang menjadi korban PHK, perempuan kepala keluarga, dan dari keluarga kurang mampu. Pemkab akan fasilitasi mereka semua berwirausaha dengan modal dan pendampingan. Ini salah satu skema pemulihan ekonomi. APBD Kabupaten Sidoarjo juga



# Policy Brief

Desember, 2021

akan memberi alokasi khusus untuk pemulihan ekonomi berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Digitalisasi UMKM akan menjadi fokus dengan membawa UMKM Sidoarjo semakin go digital serta terkoneksi dengan pasar nasional serta internasional.

### 3. Peristiwa Politik

Pelaksanaan pilkada dan pilkades yang awalnya disinyalir bisa mempengaruhi rasa aman masyarakat Kabupaten Sidoarjo, nyatanya tidak terbukti terjadi. Hal ini tentu saja menggambarkan kerja keras pihak terkait dalam mengamankan jalannya peristiwa politik tersebut, Dan juga upaya Pemerintah Kabupaten dalam menciptakan suasana yang kondusif. Hal ini berakibat signifikan pada peningkatan capaian Indeks Rasa Aman, hingga 0,63 poin.

## Rekomendasi

- a) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mengambil langkah cepat dalam pemulihan ekonomi dengan menitikberatkan masalah infrastruktur dan: peningkatan dukungan ekonomi arus bawah yakni, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
- b) Untuk mewujudkan rasa aman masyarakat memberdayakan 3 pilar; Babinsa, Lurah atau kepala desa serta yang tidak kalah pentingnya adalah masyarakat. Kenapa masyarakat harus dilibatkan, karena kejahatan itu ada ditengah-tengah masyarakat, kemudian masyarakat tersebar dimana mana, sehingga untuk mendapatkan informasi sangat mudah. Bahkan saat ini di negara maju juga sedang mengembangkan perpolisian komunitas atau "*community policing*." Kehadiran Polisi, Tentara dan Lurah sebagai mediator, Fasilitator dan jembatan antara Masyarakat dengan Pemerintah atau sebaliknya.



# Policy Brief

Desember, 2021

Peraturan Kapolri (2015) menyebutkan Pemolisian Masyarakat (Community Policing) atau Polmas merupakan kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya secara bersama-sama.

Pemberdayaan Masyarakat oleh polisi dalam rangka keamanan dan ketertiban menuju keamanan dalam negeri adalah alternatif terbaik di tengah kondisi internal Polri yang mengalami keterbatasan kemampuan dan peralatan lainnya.

Karena itu, peningkatan kembali program Community Policing merupakan strategi dengan mengedepankan para Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di desa-desa untuk membantu masyarakat. Dengan adanya Bhabinkamtibmas yang selalu berada di desa, maka pendekatan kepada masyarakat menjadi lebih humanis.

Di sisi lain para Bhabinkamtibmas yang bergaul dan terlibat dalam persoalan sehari-hari masyarakat perlu mendapatkan perhatian khusus. Perhatian ini, terutama terkait pendidikan, pelatihan dan kesejahteraan mereka agar memunculkan kepercayaan anatar masyarakat dan polisi secara faktual.

- c) Dalam pembinaan, masyarakat tidak lagi sebagai obyek tetapi sebagai subyek. Artinya masyarakat tidak lagi berdiam diri di rumah, tetapi harus bersama-sama dengan aparat desa atau kelurahan melakukan pengamanan secara swadaya.
- d) Untuk lebih mendukung terciptanya suasana kondusif hingga rasa aman masyarakat Kabupaten Sidoarjo terus terpelihara, maka berikut rekomendasi program untuk OPD terkait.



# Policy Brief

Desember, 2021

No	OPD	Rekomendasi Program / Kebijakan
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Edukasi mitigasi bencana dan petunjuk rambu-rambu bencana, bisa di perluas jangkauannya, karena berdasarkan informasi dari hasil survey, sebagian responden masih belum mengetahui tentang mitigasi dan petunjuk rambu-rambu bencana
2	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten</li> <li>• Mengawal semua bantuan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial, bisa tersalurkan pada sasaran dengan tepat.</li> </ul>
3	Dinas Tenaga Kerja	Konsisten dan kontinyu melakukan pelatihan bersertifikasi untuk mencetak tenaga kerja terlatih.
4	Satpol PP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pelayanan masyarakat, dalam rangka menegakkan Perda mengenai protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19. Pada pelaksanaannya, banyak di temui pembangkangan sipil. Peran Satpol PP yang paling utama yaitu mencegah terjadinya kerumunan dan mengurangi mobilitas masyarakat yang berpotensi terhadap penularan Covid-19. Satpol PP dituntut untuk bisa bertindak tanpa represif dan tetap humanis</li> <li>• Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan terhadap bentuk – bentuk pengawasan swakarsa sebagai pengemban fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kewenangan terbatas pada bidangnya masing–masing. Bentuk – bentuk pengawasan swakarsa ini diharapkan berperan aktif dalam mengantisipasi dan menanggulangi setiap gejala yang timbul dalam masyarakat dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan sinyal penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya melalui upaya – upaya yang mengutamakan tindakan – tindakan pencegahan dan penangkalan. Usaha pencegahan atas timbulnya ancaman / gangguan keamanan dan ketertiban melalui kegiatan pengaturan penjagaan, pengawasan dan Patroli serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib dan teratur</li> </ul>



# Policy Brief

Desember, 2021

## Referensi

---

- Agusta, Yudi. 2007. K-Means-Penerapan, Permasalahan, dan Metode Terkait. *Jurnal Sistem dan Informatika*. Vol 3: 47 – 60. Asteris Huliaras dan Nikolaos Tzifakis, "Contextual Approaches to Human Security", *International Journal*, 2007, Vol.62.No.3 page 557-575
- Garry Goertz dan Paul F. Diehl. Toward a theory of International Norms: Some Conceptual and Measurement Issues dalam *The Journal of Conflict Resolution*, Vol.36, No.4 (Dec.,1992).
- Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink. *International Norms and Political Change dalam International Organization*, Vol. 52, No.4, 1998.
- Tobias Debiel dan Sascha Werthes (ed), *Human Security on Foreign Policy Agendas, Changes, Concepts and Cases.*, INEF Report, Essen, University of Duisberg, 2006. hal.16
- T.S Hataley dan Kim Richard Nossal, "The Limits of The Human Security Agenda : The Case of Canada"s Response to the Timor Crisis" , *Global Change, Peace and Security*, Vol 16, no. 1, February 2004, Carfax Publishing.
- Tobias Debiel dan Sascha Werthes, op.cit., hal.10 135 Shahrbanou Tadjbaksh dan Anuradha M. Chenoy, Op.Cit. hal. 15 136 Tobias Debiel dan Sascha Werthes, loc cit. 137 Shahrbanou Tadjbaksh, *Human Security: Concepts and Implications*. Centre d"etudes et de recherches internationales, Sciences Po, 2005. Diakses dari [http://www.cerisciencespo.com/publica/etude/etude117\\_118.pdf](http://www.cerisciencespo.com/publica/etude/etude117_118.pdf) pada 10 Nopemeber 2020



# Policy Brief

Desember, 2021

Percepatan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Merupakan Fokus Pemerintah Pada Tahun 2021, Di akses dari [https://www.balitbangham.go.id/detailpost/percepatan-pemulihan-ekonomi-pasca-pandemi-merupakan-fokus-pemerintah\\_pada Nopember 2020](https://www.balitbangham.go.id/detailpost/percepatan-pemulihan-ekonomi-pasca-pandemi-merupakan-fokus-pemerintah_pada_Nopember_2020)

Biro Pusat Statistik, Survey Tentang Dampak Pandemi Covid 19, Desember 2020